

PERAN KEPEMIMPINAN AGILE DALAM PEMERINTAHAN DAERAH KOTA DEPOK

Tri Raharjanto¹, Karno², Heru Rochmansjah³

^{1,2,3}Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Indonesia

Email: tri.rahardjanto73@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital menuntut pemerintah daerah memiliki pola kepemimpinan yang lebih adaptif dan responsif. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran kepemimpinan agile terhadap komunikasi pemerintahan berbasis digital di lingkungan Pemerintah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 301 aparatur sipil negara yang dipilih secara proporsional. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbantuan perangkat lunak LISREL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan agile berpengaruh positif dan signifikan terhadap komunikasi pemerintahan berbasis digital, sedangkan infrastruktur teknologi informasi berpengaruh lebih besar. Secara bersama-sama, kedua faktor tersebut menjelaskan 79% varians komunikasi pemerintahan berbasis digital dengan tingkat kecocokan model yang baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan agile memiliki peran penting sebagai penggerak transformasi digital, sehingga penguatan kapasitas kepemimpinan perlu dilakukan sejalan dengan pengembangan infrastruktur teknologi.

Kata Kunci: Kepemimpinan Agile, Pemerintahan Daerah, Komunikasi Digital, Transformasi Digital, Kota Depok.

Abstract

Digital transformation requires local governments to adopt more adaptive and responsive leadership. This study aims to examine the role of agile leadership in digital-based government communication within the Depok City Government, West Java Province. A quantitative approach was used with a survey of 301 proportionally selected civil servants. Data were analysed using Structural Equation Modeling (SEM) with LISREL software. The results show that agile leadership has a positive and significant effect on digital government communication, while information technology infrastructure has a greater effect. Together, the two factors explain 79% of the variance in digital government communication with a good model fit. This study concludes that agile leadership plays an important role as a driver of digital transformation, so that strengthening leadership capacity must be carried out alongside the development of technological infrastructure.

Keywords: Agile Leadership, Local Government, Digital Communication, Digital Transformation, Depok City.

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital kini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai daerah. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya menyediakan layanan berbasis teknologi, tetapi juga mengubah cara berkomunikasi, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat (Haug, Dan, & Mergel, 2024). Di Indonesia, upaya ini dilaksanakan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menekankan integrasi layanan dan keterbukaan informasi (Kencono, Putri, & Handoko, 2024). Meskipun demikian, keberhasilan

transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan juga pada kepemimpinan yang mampu menggerakkan perubahan (Mergel, 2024).

Kota Depok merupakan salah satu daerah yang menunjukkan kemajuan dalam penerapan SPBE. Nilai indeks SPBE kota ini meningkat dari 3,42 (kategori Baik) pada tahun 2022 menjadi 3,70 (Sangat Baik) pada 2023, dan mencapai 4,32 (Memuaskan) pada 2024. Lebih dari 80% layanan publiknya telah terdigitalisasi melalui berbagai platform seperti e-Office, e-Surat, SIMPATIK, dan Depok Single Window. Namun, kemajuan indeks tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas komunikasi pemerintahan di lapangan (Wahyudi & Putri, 2024).

Beberapa persoalan masih ditemukan. Terdapat lebih dari dua puluh aplikasi yang berjalan terpisah tanpa integrasi, sehingga menimbulkan redundansi data dan memperlambat aliran informasi. Selain itu, hanya 54% aparatur yang merasa percaya diri menggunakan aplikasi komunikasi digital, dan hanya sekitar 31% warga yang aktif memanfaatkan kanal aduan digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital masih terhambat pada aspek sumber daya manusia dan kepemimpinan (Susilawati et al., 2024).

Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, konsep kepemimpinan agile mulai banyak diperbincangkan. Kepemimpinan agile menekankan kemampuan beradaptasi, kolaborasi, pemberdayaan pegawai, dan keterbukaan terhadap perubahan (Denning, 2018; Mergel, Gong, & Bertot, 2018). Kepemimpinan seperti ini dinilai lebih sesuai dengan tuntutan era digital dibandingkan model kepemimpinan hierarkis yang kaku (Fischer & Neumann, 2024). Meskipun kajian tentang kepemimpinan agile berkembang pesat, penelitian empiris di tingkat pemerintah daerah di Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran kepemimpinan agile terhadap komunikasi pemerintahan berbasis digital di Kota Depok.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kepemimpinan Agile

Kepemimpinan agile merupakan gaya kepemimpinan yang menitikberatkan pada kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang cepat. Pemimpin agile mendorong lingkungan kerja yang kolaboratif, memberi ruang untuk berinovasi, serta mendelegasikan kewenangan kepada tim (Denning, 2018). Menurut Mergel (2024), kepemimpinan agile di sektor publik bukan sekadar penerapan metode kerja seperti scrum atau kanban, melainkan cara pandang baru dalam memimpin organisasi. Dalam penelitian ini, kepemimpinan agile diukur melalui lima dimensi, yaitu mindset agility, teknik agile, struktur agile, kecepatan dan responsivitas, serta keterbukaan dan transparansi.

Di Indonesia, peran kepemimpinan digital dinilai penting untuk mendorong perubahan perilaku aparatur dan mendukung keberhasilan transformasi (Tulungen, Saerang, & Maramis, 2022). Pemimpin yang adaptif mampu menciptakan iklim kerja yang responsif terhadap perkembangan teknologi.

2. Komunikasi Pemerintahan Berbasis Digital

Komunikasi pemerintahan berbasis digital adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi yang dilakukan melalui media digital, baik antarunit pemerintah maupun antara pemerintah dan masyarakat. Perkembangan komunikasi digital sejalan dengan evolusi e-government yang menekankan keterbukaan data, transparansi, dan partisipasi publik (Rusdy & Flambonita, 2023).

Efektivitas komunikasi digital pemerintah daerah masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia (Maryuni et al., 2024). Dalam penelitian ini, komunikasi pemerintahan berbasis digital diukur melalui lima dimensi, yaitu transparansi, akuntabilitas, keterbukaan data, partisipasi publik, serta keamanan dan privasi.

3. Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur teknologi informasi merupakan faktor pendukung utama dalam komunikasi digital. Infrastruktur ini mencakup ketersediaan perangkat keras dan lunak, jaringan internet, keamanan sistem, serta dukungan teknis (Ciancarini, Giancarlo, & Grimaudo, 2024). Penataan infrastruktur yang baik terbukti berdampak pada peningkatan indeks SPBE pemerintah daerah (Yustisiawandana & Aji, 2024).

Dalam penelitian ini, infrastruktur teknologi informasi diukur melalui lima dimensi, yaitu ketersediaan teknologi, integrasi sistem, keamanan dan privasi, dukungan teknis dan pemeliharaan, serta pengembangan kapasitas dan pelatihan.

4. Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka di atas, diajukan dua hipotesis penelitian:

H₁: Kepemimpinan agile berpengaruh positif dan signifikan terhadap komunikasi pemerintahan berbasis digital di Kota Depok.

H₂: Infrastruktur teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komunikasi pemerintahan berbasis digital di Kota Depok.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang terlibat dalam penyelenggaraan komunikasi pemerintahan berbasis digital. Sampel ditetapkan sebanyak 301 responden yang dipilih secara proporsional dari berbagai organisasi perangkat daerah agar setiap unit kerja terwakili.

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert lima titik. Kuesioner disusun berdasarkan tiga variabel penelitian yang dijabarkan ke dalam lima belas indikator. Analisis data dilakukan dengan Structural Equation Modeling (SEM) berbantuan perangkat lunak LISREL, menggunakan metode estimasi maximum likelihood. Pengujian dilakukan melalui model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas, serta model struktural untuk menguji hipotesis. Ambang signifikansi ditetapkan pada nilai t sebesar 1,96 dengan tingkat keyakinan 95% (Wijanto, 2008).

Gambaran karakteristik responden disajikan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Karakteristik Responden (n = 301)

Karakteristik	Kategori	Persentase
Jabatan	Eselon IV	88%
Unit Kerja	Teknologi Informasi	47%
Pengalaman Kerja	> 10 tahun	72%
Pemahaman SPBE	Sangat Paham/Paham	74%
Penerapan SPBE > 5 Tahun	Ya	59%

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji kecocokan model (*goodness of fit*). Dari tujuh belas indeks yang diperiksa, lima belas indeks berada pada kategori fit dan dua indeks berstatus marginal. Hasil ini menunjukkan bahwa model yang dibangun sesuai dengan data di lapangan. Ringkasan indikator kunci disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Uji Kecocokan Model

Indeks	Ambang	Hasil	Keterangan
GFI	$\geq 0,90$	0,91	Fit
RMSEA	$\leq 0,10$	0,088	Fit
SRMR	$\leq 0,11$	0,030	Fit

NFI	$\geq 0,90$	0,98	Fit
CFI	$\geq 0,90$	0,99	Fit

Sumber: Output LISREL, 2025

Hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Jalur Pengaruh	Koefisien	t-value	Keputusan
Kepemimpinan Agile $\rightarrow$ KPBD	0,28	4,00	H1 diterima
Infrastruktur TI $\rightarrow$ KPBD	0,63	8,44	H2 diterima

Keterangan: KPBD = Komunikasi Pemerintahan Berbasis Digital

Sumber: Output LISREL, 2025

Hipotesis pertama diterima. Kepemimpinan agile berpengaruh positif dan signifikan terhadap komunikasi pemerintahan berbasis digital, dengan koefisien jalur 0,28 dan nilai t sebesar 4,00. Artinya, semakin baik penerapan prinsip kepemimpinan agile, semakin efektif pula komunikasi digital yang terjadi. Pemimpin yang adaptif dan terbuka mampu mendorong pegawai untuk lebih responsif dalam menggunakan teknologi. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mergel (2024) bahwa kepemimpinan agile membuka ruang bagi budaya kerja yang lebih kolaboratif di lingkungan pemerintahan.

Hipotesis kedua juga diterima dengan pengaruh yang lebih besar. Infrastruktur teknologi informasi memperoleh koefisien jalur 0,63 dan nilai t sebesar 8,44. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan jaringan, perangkat, sistem terintegrasi, dan keamanan informasi sangat menentukan kelancaran komunikasi digital. Secara bersama-sama, kedua faktor menjelaskan 79% varians komunikasi pemerintahan berbasis digital ($R^2 = 0,79$), sedangkan 21% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini.

Perbandingan kedua koefisien menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan kepemimpinan agile. Namun, hal ini tidak berarti kepemimpinan kurang penting. Keduanya justru saling melengkapi: infrastruktur menjadi alat pendukung, sedangkan kepemimpinan agile menjadi penggerak yang memastikan teknologi dimanfaatkan secara optimal. Tanpa kepemimpinan yang adaptif, investasi teknologi berisiko tidak memberikan dampak nyata (Wahyudi & Putri, 2024). Dengan demikian, penguatan kapasitas kepemimpinan agile perlu dilakukan sejalan dengan pengembangan infrastruktur.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan agile memiliki peran penting dan berpengaruh positif serta signifikan terhadap komunikasi pemerintahan berbasis digital di Kota Depok. Infrastruktur teknologi informasi berpengaruh lebih besar, dan secara bersama-sama kedua faktor menjelaskan 79% varians komunikasi digital. Kepemimpinan agile berperan sebagai penggerak transformasi digital yang memastikan pemanfaatan teknologi berjalan efektif. Pemerintah Kota Depok disarankan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan agile melalui pelatihan dan pemberian ruang pengambilan keputusan yang lebih fleksibel, sekaligus terus mengembangkan infrastruktur teknologi. Penelitian ini terbatas pada satu pemerintah kota, sehingga penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah serta menambahkan variabel lain yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ciancarini, P., Giancarlo, R., & Grimaudo, G. (2024). Digital transformation in public administrations: A guided tour for computer scientists. *IEEE Access*, 12, 22841–22865.
- Denning, S. (2018). *The age of agile: How smart companies are transforming the way work gets done*. AMACOM.

- Fischer, C., & Neumann, O. (2024). Adopting agile in government: A comparative case study. *Public Management Review*, 26(12), 3692–3714. <https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2354776>
- Haug, N., Dan, S., & Mergel, I. (2024). Digitally-induced change in the public sector: A systematic review and research agenda. *Public Management Review*, 26(7), 1963–1987. <https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2234917>
- Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1498-1506.
- Maryuni, S., Darmawan, D., Apriyani, E., Zesa, P., & Selpiani, W. (2024). Transformasi pelayanan digital terpadu dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(4), 1011–1028. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22479>
- Mergel, I. (2024). Social Affordances of Agile Governance. *Public Administration Review*, 84(5), 932–947. <https://doi.org/10.1111/puar.13787>
- Mergel, I., Gong, Y., & Bertot, J. (2018). Agile government: Systematic literature review and future research. *Government Information Quarterly*, 35(2), 291–298. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.04.003>
- Rusdy, R. M. I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance. *Lex LATA*, 5(2), 218–239. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351>
- Susilawati, K., Ilham, D., Sunarsi, D., & Haedar, A. W. (2024). Pelayanan Publik Berbasis Digital pada Organisasi Sektor Publik di Indonesia. *Pallangga Praja*, 6(1).
- Tulungen, E. E. W., Saerang, D. P. E., & Maramis, J. B. (2022). Transformasi digital: Peran kepemimpinan digital. *Jurnal EMBA*, 10(2), 1116–1123. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41399>
- Wahyudi, F. A., & Putri, N. E. (2024). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1). <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1>
- Wijanto, S. H. (2008). *Structural equation modeling dengan LISREL 8.8: Konsep dan tutorial*. Graha Ilmu.
- Yustisiawandana, F. T., & Aji, R. F. (2024). Perancangan enterprise architecture untuk meningkatkan indeks SPBE pemerintah daerah: Studi kasus Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 6(1), 187–199. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i1.1133>